

Dr. H.M. Atho Mudzhar :

“Masyarakat tidak Obyektif Menilai Pendidikan Islam”

Pengantar Redaksi

Mulai edisi ini, JPI mencoba menampilkan wawancara topik inti dengan tokoh, dan yang pertama dipilih adalah Dr. H.M. Atho Mudzhar, yang pernah menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (1991-1994) dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (1994-1997) Dep. Agama Pusat, dan kini menjadi Pjs. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Redaksi menyiapkan kolom ini dengan berasumsi bahwa artikel-artikel yang disajikan dalam JPI, umumnya dipersiapkan melalui proses berpikir yang monoton dan mapan, sedangkan wawancara adalah proses berpikir spontan. Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan peran proses berpikir yang monoton dan mapan, melalui wawancara diharapkan ada sesuatu yang lain dan baru melalui pemikiran-pemikiran spontanitas tersebut, yang jarang sekali terjadi dalam proses berpikir yang “berkesempatan”, bukan spontanitas. Untuk yang pertama ini, wawancara dilakukan dan ditulis kembali oleh Muslih Usa, Wakil Ketua Penyunting JPI, yang akan disebut JPI dan Dr. H.M. Atho Mudzhar disebut dengan MAM.

J P I . *Apakah yang dimaksud dengan pendidikan Islam ?*

MAM. Menurut saya, pengertian pendidikan Islam dapat dijelaskan dalam dua bentuk. *Pertama*, pengertian pendidikan Islam sebagai lembaga, dan *kedua*, pendidikan Islam sebagai proses. Kalau melihat pendidikan Islam sebagai lembaga, maka wujudnya adalah *Pesantren, Madrasah*, dan lain-lain. Tetapi, kalau dilihat dari segi proses lain lagi. Pendidikan Islam di SD, SMP, SMU, atau di Fakultas-Fakultas umum seperti Kedokteran dan lain-lain, itu adalah juga pendidikan Islam. Jika mahasiswa Fakultas Kedokteran atau Teknik, baik

negeri atau swasta beragama Islam, menurut saya, ini pendidikan Islam. Pada mereka ini, pendidikan Islam sebagai proses, fungsinya adalah memberi nilai-nilai ketuhanan terhadap diri mereka dan ilmu yang mereka pelajari dan kembangkan. Jadi, kedua bentuk ini dapat dikatakan pendidikan Islam.

J P I . *Apakah perbedaan pendidikan Islam model Madrasah dengan sekolah umum setingkat ?*

MAM. Sejak diberlakukannya Kurikulum 1994, tidak sepenuhnya benar membedakan Madrasah seperti Aliyah dengan SMU, atau Madrasah Tsanawiyah dengan SMP, ka-

rena kurikulumnya 100% sama. Hanya mungkin kualitas gurunya, sarana pendidikannya saja yang belum sama. Jadi hanya hal ini saja dan bukan soal-soal yang mendasar yang membedakan mereka. Nah, nilai plus dari sekolah agama yang mendasar adalah diharapkan ada komitmen nilai yang lebih tinggi, dan ini kelebihannya. Dalam jangka panjang, semua ini merupakan eksperimen bangsa.

J P I. *Tapi masyarakat masih membedakan MA (Madrasah Aliyah) dan SMU, dan mereka lebih percaya pada SMU ketimbang MAN. Bagaimana itu !*

MAM. Betul itu, dan itu barang kali harus dihapus. Sesungguhnya ada keunggulan Madrasah, yaitu di bidang kemasyarakatan. Lulusan sekolah agama lebih cepat dapat bergaul dengan masyarakat, dan ini dibuktikan pada setiap KKN, BUTSI, Pramuka dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sudah setengah keberhasilan. Menurut suatu penelitian di Amerika, bahwa orang sukses melayani satu pekerjaan, melakukan suatu pekerjaan, ternyata hanya sekitar 20% saja unsur keahlian, selebihnya adalah *human relation*. Di sinilah

keunggulan sekolah agama yaitu *human relation* ini sudah dikuasainya. Jadi, sekolah agama sudah menguasai yang 80%, tinggal yang 20% itu saja. Tentu hal ini jika sebagai seorang manager, yang lain sekali jika harus sebagai peneliti. Ini berarti, sekolah-sekolah agama memang belum siap sepenuhnya melahirkan peneliti laboratorium, yang memerlukan 80% bidang ilmu dan 20% *human relation*. Sedangkan untuk memimpin, manager, justru sudah dikuasainya. Untuk itu, saya kira hal ini akan berproses, karena kalau kita lihat dari tahun '45 sampai sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan umum di Madrasah sudah semakin membesar, dan sekarang ini pada puncaknya dan sudah sama dengan sekolah umum. Jadi artinya, kelompok Madrasah secara teoritik sama dengan sekolah umum.

J P I. *Masyarakat kita tampaknya masih berasumsi, bahwa kualitas Madrasah masih dibawah rata-rata sekolah umum. Apa pendapat anda tentang hal tersebut !*

MAM. Begini, sebenarnya masyarakat kita itu tidak obyektif. Artinya, walaupun kualitasnya sama, apabila mereka

mengetahui yang satu dari Madrasah Aliyah dan yang satu dari SMU misalnya, mereka langsung menduga bahwa yang dari Madrasah lebih rendah mutunya. Padahal tidak boleh begitu, namun itulah masyarakat. Jadi *image* itu harus dibentuk, tapi dengan apa, itulah yang tidak pernah kita rencanakan. Padahal dapat dilakukan misalnya dengan tulisan, dengan iklan yang menampilkan lulusan Aliyah yang berhasil. Itu dari satu segi. Sisi lainnya adalah, mungkin di kalangan umat Islam sendiri juga ada kerinduan yang menyenangkan dengan menggunakan Madrasah. Mereka mengira kata Madrasah lebih sakral daripada sekolah. Dan yang lebih menarik lagi, Madrasah terus bertambah dari waktu ke waktu.

J P I. *Apakah benar pendapat para pemerhati pendidikan Islam, bahwa di dalamnya ditemukan berbagai ketertinggalan di banding sekolah umum?*

MAM. Itu betul, dalam berbagai hal. Tapi ada kelebihan dalam lembaga pendidikan Islam, dan itu semakin dirasakan oleh lembaga pendidikan umum. Yang namanya tawuran, itukan tidak terjadi

di sekolah agama. Hanya saja, keterampilan dalam bidang ilmu tertentu memang dirasa kurang.

J P I. *Kalau begitu, bagaimana jika dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam tertinggal dibanding sekolah umum?*

MAM. Itu yang saya kurang setuju. Tertinggal dalam bidang apa dulu. Sebab, kalau mereka itu bicara dalam bidangnya, sebenarnya mereka tidak ketinggalan. Tapi kalau mereka diminta untuk berbicara bidang lain atau di luar bidangnya, mungkin itu benar. Inilah kesulitannya, mereka harus menentukan bahwa ilmu sebagai bidang disiplin yang ditekuni, itu harus merupakan pilihan di lembaga-lembaga yang mendukung pendidikan agama. Dan di situlah menangnya jika kita lebih suka melihat pendidikan Islam sebagai proses, bukan sebagai lembaganya saja.

J P I. *Bagaimana jika kita garis bawahi, bahwa secara umum pendidikan Islam di Indonesia tertinggal di banding sekolah umum ?*

MAM. Benar itu, untuk menyatakan tertinggal harus ada pembandingnya. Tapi juga tidak boleh digeneralisir begitu

saja, karena ada Madrasah yang unggul di banding sekolah-sekolah umum setingkat di sekitarnya, seperti *Madrasah Ibtidaiyah Negeri* di Malang. Namun memang dapat dikatakan banyak, atau kebanyakan lembaga pendidikan Islam sekarang ini, proses pendidikannya, belajar-mengajarnya, masih mengalami sejumlah hambatan yang lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan umum. Kirakira begitu. Nah, sebabnya apa? Karena sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan Islam itu adalah berstatus swasta, yang hanya mengandalkan dukungan masyarakat. Sedangkan sekolah umum sebaliknya, apalagi untuk tingkat dasar, sebagian besar negeri dan berarti ada dukungan dana yang kuat. Ini salah satunya. Tetapi, menurut saya, yang terpenting lagi adalah orientasi ilmu menghadapi dikhotomi. Di semua tingkatan, dan juga bukan hanya di tingkat guru, tapi juga pada masyarakat. Nah, karena belum menentukan sikap mengenai dikhotomi, maka para orangtua memilih, akan mengirimkan kemana anaknya.

J P I. *Kalau begitu, apakah mungkin jika suatu saat nanti, masyarakat yang makin mendambakan kualitas SDM akan lebih cenderung memilih sekolah umum, dalam arti mengenyampingkan sekolah agama ?*

MAM. Saya kira hal itu belum tentu. Sebab, kalau berbicara SDM, sebetulnya apa yang kita bicarakan? Ini sekurangnya membicarakan tiga hal, yaitu *pertama*, peningkatan kualitas fisik. Ini bisa dilakukan di lembaga pendidikan apa saja, fisik sehat di IAIN bisa, Universitas lain juga bisa. Tidak ada masalah mengenai hal tersebut. *Kedua*, spesialisasi, profesionalisme. Di sini mungkin lembaga pendidikan seperti IAIN sedikit terhalang untuk mengambil profesionalisme dalam bidang-bidang tertentu, kecuali sebatas menjembatani. Dan yang *ketiga*, adalah komitmen atau nilai yang menempel pada seseorang, seperti nilai suka menolong yang lemah, semangat dalam bekerja, nilai kejujuran, atau etos, itu ada di mana-mana. Tapi di lembaga pendidikan Islam diharapkan berperan lebih besar. Jadi dari tiga, dua diantaranya sudah diperankan lembaga pendidikan Islam. Nah

tinggal yang satu, yang baru dilakukannya separuh (sebatas mengenal, *red.*). Jadi sebetulnya arah yang dituju sudah benar dan tidak begitu ketinggalan. Hanya saja, pelan-pelan. Nah, untuk menyelesaikan yang baru separuh itu, atau baru melihat IPTEK sebagai jembatan dalam menerangkan agama, maka untuk bisa sampai pada IPTEK sebagai disiplin, di situlah IAIN harus memutuskan. Kalau tingkat Aliyah (Madrasah, *red.*), sudah memutuskan, dan mereka sudah menggunakan kurikulum sebagaimana SMU, dengan menambah pengetahuan tentang agama. Kalau di IAIN belum memutuskan, karena tampaknya masih banyak hambatan.

J P I. *Apa kira-kira hambatannya*

MAM. Hambatannya adalah karena mereka masih kesulitan merumuskan atau menjawab persoalan dikhotomi ilmu pengetahuan. Menurut saya, kalau problem dikhotomi ini tidak segera diselesaikan, mereka akan "ngambang" terus seperti sekarang ini. Jadi, apa peranan yang diharapkan dari lembaga pendidikan Islam. Kalau kita lihat Madrasah jelas, dan yang sedang terjadi adalah

pergeseran dari Madrasah dengan substansi ilmu agama yang banyak sekali, menjadi Madrasah yang ilmu umumnya semakin banyak, seperti sekolah biasa. Itu yang terjadi sekarang. Sedangkan untuk tingkat IAIN, karena dirasakan bahwa ilmu-ilmu agama itu harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu umum, mengingat keterkaitan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk penjelasannya belum ditemukan. Sedangkan yang sudah dilakukan masih dalam bentuk *studium generale*, penelitian, penambahan ilmu bantu dalam kurikulum seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan lain-lain. Tapi sebagai disiplin ilmu, misalnya IAIN membuka Fakultas Kedokteran, itu masih asing, mungkin masih dalam ide, dan kalau dikemukakan mungkin ditentang orang. Tapi IAIN harus memutuskan itu. Cuma ada pertanyaan yang timbul karena kebutuhan masyarakat, jalur pendidikan yang melahirkan ahli agama, perlu atau tidak. Jawabnya tentu perlu, dan dengan begitu harus ada jalur pendidikan yang khusus melahirkan ahli agama. Namun perlu dipikirkan,

berapa jumlahnya. Ini perlu ada perencanaan sosial, perlu ada penghindangan kebutuhan. Jadi sebetulnya, secara mendasar, yang harus dijawab dulu ialah soal dikhotomi ilmu itu, apakah IAIN juga membuka Fakultas-fakultas umum. Nah, sekarang ini yang dilakukan IAIN sebenarnya juga sudah baik, yaitu tidak membuat jarak dengan IPTEK, tapi mencoba mendekati IPTEK, namun mereka tetap tujuannya adalah menciptakan ahli-ahli agama, yang mengenal IPTEK, sehingga kalau mereka ceramah bisa memberikan contoh-contoh. Jadi IPTEK sebagai jembatan untuk menerangkan nilai agama, belum IPTEK sebagai bidang ilmu yang mau ditekuni.

J P I. *Bagi IAIN, kalau hambatan utama perkembangannya adalah persoalan dikhotomi ilmu, kenapa tidak dicoba atasi misalnya dengan merubah IAIN menjadi Universitas ?*

MAM. Begini, persoalan dikhotomi itu sebenarnya bukan hanya di IAIN saja, tapi hal itu ada dibenak-benak semua orang. Jadi kalau ingin merubah dikhotomi berarti harus merubah semua benak-benak itu. IAIN boleh saja me-

rubah, tapi bagaimana jika masyarakat tidak suka? Itu berarti anak-anaknya tetap tidak dikirimkan ke IAIN, sekalipun telah berubah. Ini misalnya. Tapi mungkin sebagai salah satu jalan, itu betul. Hanya saja jangan dikira kalau itu dilakukan akan segera menyelesaikan persoalan dengan serta merta, tidak bisa begitu. Ini masih ditambah soal aturan-aturan main dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti, kalau jadi Universitas, IAIN di bawah siapa, DIKBUD atau DEPAG. Sekalipun sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu ada, tapi itu fakta. Lalu kemudian, kalau bidang ilmu umum, Fakultas kedokteran di bawah DEPAG, siapa yang mensupervisi, mutunya, tingkatnya, standarnya, beayanya, siapa yang mendorong. Karena itu, enak sebetulnya kalau kita berfikir, jangan membedakan lembaga pendidikan agama dengan proses pendidikan agama. Semua yang ada di DIKBUD, itu juga sudah pendidikan Islam, tinggal diefektifkan.

J P I. *Adakah jalan keluar lain, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu?*

MAM. Menurut saya, jalan keluarnya dan tidak hanya untuk sementara waktu saja, kita jangan hanya bertumpu kepada lembaga pendidikan agama, karena jumlahnya hanya sekitar 20% dari jumlah lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk itu, perhatian kita sebenarnya justru harus bertumpu kepada pendidikan Islam sebagai proses. Memang di lembaga pendidikan umum ada mul-ti agama, tapi karena Pancasila, hal itu menjadi mungkin dilaksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa jauh nilai-nilai ketuhanan sebagaimana diajarkan dalam Pancasila, telah mewarnai, telah memberikan jiwa terhadap seluruh kehidupan percobaan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di lembaga pendidikan umum tersebut. Mudah-mudahan hal ini terus ada dan secara teoritik jaminannya memang ada di negara yaitu Pancasila. Sedangkan secara praktis harus kita buktikan.

J P I. *Pada dasarnya sekarang ini kita mulai menjalani era industrial. Bagaimanakah model pendidikan Islam dalam era industrial?*

MAM. Apakah yang dimaksud dengan era industrial? Yaitu, terbentuknya suatu masya-

rakat yang ditandai dengan struktur ekonomi industri lebih dominan daripada struktur ekonomi agraris, dengan ciri-ciri umumnya adalah banyak membutuhkan "tukang-tukang" dalam berbagai bidang. Dengan begitu, sekolah-sekolah kita diminta untuk menyiapkan, mengisi jabatan-jabatan tukang itu. Ciri lainnya adalah ada jasa sektor ketiga yang mengurus transfer produk-produk industri itu, perdagangannya dan sebagainya. Sekarang bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam mengantisipasi hal tersebut? Mengingat sekolah prinsipnya bukan untuk bekerja, maka yang mungkin dan sudah dilakukan adalah dengan memberikan keterampilan sampingan, yaitu keterampilan "tukang". Itu yang sudah dilakukan. Sedangkan yang harus dijawab adalah, berani atau tidak memberikan keterampilan "tukang" sepenuhnya. Di sini akan berimplikasi kembali pada persoalan dikhotomi juga. Sedangkan mengenai adanya ketertinggalan, itu biasa. Dalam ongkos-ongkos masa transisi, kalau ada yang tertinggal itu hal yang wajar, karena yang bergerak ke dalam industri

itu bukan hanya membuat kelompok pendidikan agama tertentu ketinggalan, bukan hanya begitu. Tetapi juga desa tertentu ada yang ketinggalan, bahkan dia sendiri tinggalnya di kota. Mengapa? Karena masalah tingkat pendidikan dan lain-lainnya. Bisa jadi orang yang tidak ikut sekolah agama, dan tinggal di kota, ketinggalan abad XXI. Nah dibandingkan dengan mereka ini, mereka yang masuk lembaga pendidikan Islam, sebetulnya sudah lebih siap untuk menghadapi abad XXI, dibanding yang tidak ikut. Inilah jika kita berfikir secara optimis.

J P I. *Apakah faktor yang menyebabkan lembaga pendidikan Islam mengalami ketertinggalan dibanding sekolah umum, selain faktor kebijakan dan penerapan politik pendidikan di Indonesia?*

MAM. Faktor manajemen. Mengapa? Karena kebanyakan lembaga pendidikan Islam dikelola oleh mereka yang tidak terdidik untuk memenej pendidikan secara berteori. Mereka hanya belajar dari pengalaman, dan pengalaman dilihat membentuk kemampuan. Faktor kedua adalah ketertutupan. Mes-

kipun Madrasah-madrasah itu sudah menjadi sekolah resmi, nyatanya mereka masih terkait dengan tokoh-tokoh informal, seperti Kiai dan sebagainya. Itu ada pengaruhnya juga, seperti menjadikannya tidak independen.

J P I. *Bagaimanakah cara memperbaikinya ?*

MAM. Dibenahi, terutama tingkat SDM managemennya itu. Di sini harus ada keberanian mengambil keputusan untuk tidak menempatkan seorang "manager" yang tidak menguasai manajemen. Sedangkan dalam kaitan untuk mendukung pendidikan Islam sebagai proses, maka harus diciptakan lembaga yang menawarkan beasiswa, mengatur dengan baik dengan jumlah yang besar, untuk anak-anak Islam yang sekolah di perguruan tinggi umum seperti ITB, IPB, dan lain-lain. Sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi sesuatu yang terlupa bagi kita. Padahal jika ini terlaksana, maka setiap yang diberikan beasiswa dapat disyaratkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan pada sore harinya atau pada waktu tertentu di luar waktu kuliahnya.

“Pendidikan Islam” yang demikian tidak bisa diabaikan keampuhannya.

J P I. *Apa mungkin bentuknya seperti yang dilakukan di UII sekarang ini, yaitu memberi beasiswa secara penuh (termasuk biaya hidup) dan tahun 1996/1997 baru untuk Fakultas Tarbiyah-Syariah, dengan penyaratan bersedia di pondokkan dan mendalami pelajaran agama Islam di luar jam kuliah?*

MAM. Ya, tapi yang lebih bagus apabila untuk Fakultas ek-

sakta seperti kedokteran, biologi, pertanian, dan lain-lain. Ini mungkin nanti dapat menjadi satu model yang akan dikembangkan, yaitu model pendidikan Islam yang tidak berdiri sendiri, tapi berkait dengan lembaga pendidikan yang dikatakan umum. Jadi, berjalan bersama-sama dan itu saya kira akan muncul satu konvergensi, cuma bentuknya pelan-pelan.